

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTO.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	14
1.3. Tujuan Penelitian .....	14
1.4. Manfaat Penelitian .....	14
1.5. Metode Penelitian .....	15
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum .....	15
1.5.2. Pendekatan ( <i>approach</i> ) .....	15
1.5.3. Sumber Bahan Hukum ( <i>legal source</i> ) .....	16
1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	19
1.5.5. Analisis Bahan Hukum .....	20
1.6. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II. <i>RATIO DECIDENDI</i> PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN <i>RATIO LEGIS</i> PENGATURAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK NASIONAL .....</b>	<b>22</b>
2.1. Sejarah Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia .....	22
2.1.1. Pemilihan Umum 1955.....	22

2.1.2. Pemilihan Umum Orde Baru .....	25
2.1.3. Pemilihan Umum 1999.....	27
2.1.4. Pemilihan Umum 2004 .....	28
2.1.5. Pemilihan Umum 2009 .....	32
2.1.6. Pemilihan Umum 2014 .....	34
2.1.7. Pemilihan Umum 2019 .....	37
2.2. <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi .....	40
2.2.1. <i>Ratio Decidendi</i> Putusan MK. Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 .....	40
2.2.2. <i>Ratio Decidendi</i> Putusan MK. Nomor 14/PUU-XI/2013 .....	45
2.2.2.1 Pertimbangan Dalil-Dalil Permohonan .....	45
2.2.2.2 Pendapat Berbeda ( <i>Dissenting Opinion</i> ) Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati .....	56
2.3. <i>Ratio Legis</i> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .....	59
2.3.1. Latar Belakang Dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Yang Tertuang Dalam Naskah Akademik Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .....	59
2.3.1.1 <i>Coattail Effect</i> dan <i>Political Efficacy</i> .....	59
2.3.1.2 Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru .....	62
2.3.1.3 Berdasarkan Landasan Filosofis .....	63
2.3.1.4 Berdasarkan Landasan Sosiologis .....	64
2.3.1.5 Berdasarkan Landasan Yuridis .....	66
<b>BAB III. MODEL PEMILIHAN UMUM ALTERNATIF PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK NASION..</b>	<b>69</b>
3.1. Model Pemilihan Umum Serentak.....	69
3.1.1. Pengertian Pemilihan Umum Serentak .....	69
3.1.2. Varian Pemilihan Umum Serentak .....	77
3.2. Model Pemilihan Umum Alternatif Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Nasional .....	89

3.2.1. Model Pemilu Alternatif .....	89
3.2.2. Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah Dari Pemilu Lokal Serentak .....	96
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>115</b>
4.1. Kesimpulan .....	115
4.2. Saran .....	117
<b>DAFTAR BACAAN</b>	

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Pemilihan Umum dan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1955 tentang Perubahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Dan Panitia Pemilihan Kabupaten;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagai perubahan terakhir;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diubah dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang sebagai perubahan terakhir;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai perubahan terakhir.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Laporan Jumlah Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum Yang Meninggal Selama Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 Di Indonesia .....	11
Tabel 1.2	Perbandingan Perolehan Suara Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Dan Tahun 2019 .....	61
Tabel 1.3	Kelebihan Dan Kekurangan Varian Model Pemilihan Umum Serentak .....	84